

**ANALISIS KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA METRO**

**COMPETENCY ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES, INFORMATION  
TECHNOLOGY AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE QUALITY OF  
SKPD FINANCIAL REPORTS  
IN THE METRO CITY GOVERNMENT ENVIRONMENT**

**Emi Nelawati,<sup>1</sup> Suharto,<sup>2</sup> Afdal Mazni**

<sup>1,2,3</sup>Muhammadiyah University of Metro, Metro City, 34111, Indonesia

**Abstract**

*The purpose of this study was to empirically examine the effect of competence of HR, information technology and internal control systems on the quality of SKPD financial reports. Respondents in this study were 54 people consisting of officials from the head of the finance sub section and staff who were directly involved in the preparation of financial reports at SKPD in Metro City. Based on the analysis results obtained from 54 samples regarding the influence of HR competence, information technology and internal control systems on the quality of financial reports, it can be concluded that the F test results indicate that all three have an effect on the quality of financial reports. This can be seen from the table of F test results with the calculation that  $30,004 > F_{tabel} 2,79$ . And the Sig value is  $0,000 < 0,05$  and. Human resource competencies, information technology and internal control systems have a positive and significant impact on the quality of financial reports. The results of a simple regression test that were processed using the SPSS version 16.0 program obtained an equation, namely:  $Y = 13,675 + 0,411 X1 + 0,317 X2. + 0,226 X3 + et$ . From these equations, it can be seen that the three variables (X1, X2, X3) studied have a positive affect the variable quality of financial statements (Y). From this analysis it can be concluded that the competence of human resources, information technology and internal control systems have a direct effect on the quality of SKPD's financial reports.*

**Keywords:** HR Competence, Information Technology, Internal Control System, Financial Report Quality

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Perubahan yang sangat dinamis terhadap peraturan-peraturan penyelenggaraan pemerintahan menuntut diterapkannya upaya-upaya dalam

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap sendi penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintahan yang *good governance*. Salah satu upaya tersebut adalah mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan

akuntabel, antara lain melalui penyusunan anggaran yang berbasis kinerja serta penyampaian pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran pada setiap periodenya.

Sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan keuangan yang menjadi kewenangannya, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tersebut harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mensyaratkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam rangka memenuhi standar kualitas laporan keuangan pemerintah.

Di dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tersebut Pemerintah dituntut dapat menyajikan dan mengungkapkan data dan informasi yang lengkap, jelas, dan berkualitas nilai informasinya sehingga dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Informasi dianggap bermanfaat jika pengguna informasi memahami, mempercayai, dan menggunakan informasi tersebut (Andriani, dalam Mahaputra & Putra, 2014).

Di samping itu, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga sebagai bentuk laporan atas kekayaan yang dimiliki organisasi, baik ditingkat SKPD maupun di

tingkat Pemerintah Daerah. Sehingga kesalahan penyajian laporan keuangan baik di tingkat SKPD maupun Pemerintah daerah dapat berdampak pada saat evaluasi dan pengambilan keputusan yang terkait kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan yang akan diambil pada perencanaan anggaran tahun selanjutnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selain digunakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, juga digunakan oleh banyak stakeholders lainnya sebagai pemangku kepentingan, antara lain DPRD selaku pihak legislative dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BPK RI sebagai fungsi pengawas dan auditor eksternal, masyarakat serta instansi lainnya yang berkepentingan, dalam rangka pengambilan keputusan dan sumber informasi dan bahan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dapat memberikan informasi yang memadai untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan pemerintah guna dalam hal penyajian informasi yang dapat bermanfaat bagi para pengguna maka informasi yang disajikan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi di dalam

laporan keuangan tersebut antara menyajikan: (a) informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; (b) informasi tentang penerimaan daerah pada periode tersebut yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran; (c) informasi tentang sumber daya ekonomi yang digunakan serta hasil dicapai; (d) informasi tentang bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan memenuhi kebutuhan kasnya; (e) informasi tentang posisi keuangan dan kondisi pemerintah yang berhubungan dengan sumber-sumber penerimaan daerahnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; (f) informasi tentang perubahan posisi keuangan pemerintah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam periode satu tahun anggaran. Dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut dinyatakan bahwa terhitung mulai tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Laporan Keuangan juga harus memenuhi kriteria laporan keuangan pemerintah secara karakteristik kualitatif seperti yang disyaratkan agar dapat

memenuhi kualitas yang dituju yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Pemerintah juga dituntut untuk dapat menyampaikan laporan keuangan pemerintah dengan tepat waktu, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tentunya kualitas laporan keuangan selain diukur dari keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan, juga pada ketepatanwaktuan dalam penyampaiannya menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Karena Apabila laporan SKPD tidak memiliki kualitas yang baik serta terlambat disampaikan, tentunya hal ini dapat berdampak pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI selaku auditor

eksternal, sehingga dapat mempengaruhi pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Atas pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan, BPK memberikan penilaian berupa Opini atas penyajian LKPD. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan SAP, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI ini menjadi penting karena laporan keuangan yang telah diperiksa ini sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Sedangkan pemberian opini pemeriksaan oleh BPK RI, selain sebagai pengakuan tertulis atas kewajaran pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan, juga menjadi bahan penilaian dan syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada saat perhitungan alokasi anggaran

untuk pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBN.

Sebagaimana tercantum pada pernyataan opini BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro tahun anggaran 2019, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan konsolidasian dari seluruh Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja (SKPD) dan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. Sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SKPD selaku entitas akuntansi wajib menyusun Laporan Keuangan atas transaksi akuntansi yang dilaksanakan sesuai dengan periode pelaporan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Kepala SKPD menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada kepala daerah selambatnya 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Di samping itu sebagai komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Keuangan SKPD sangat mempengaruhi kualitas dan kehandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan SKPD harus dapat

menjelaskan secara material atas setiap komponen laporan keuangan. Dan di dalam prosesnya kemungkinan kesalahan dapat saja terjadi pada penyajian data laporan keuangan, baik pada data dalam setiap komponen laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, Neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta pada laporan Perubahan saldo anggaran lebih. Kemungkinan kesalahan saji juga dapat terjadi pada pengungkapan informasi dan penjelasan terinci yang disajikan didalam komponen catatan atas laporan keuangan. Sehingga hal ini dapat berakibat nilai informasi pada laporan keuangan menjadi tidak akurat dan tidak tepat.

Menurut Halim (2007), bahwa Laporan Keuangan merupakan suatu data dan informasi. Sedangkan menurut Lillrank (2003) bahwa informasi yang bermakna berasal dari perubahan data dalam suatu konteks tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sebagai sebuah sumber informasi disusun dari keberadaan ketersediaan data, bagaimana system yang mengolah data tersebut serta bagaimana cara mengkomunikasikan data tersebut menjadi sebuah informasi.

Didalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tentunya tidak terlepas dari pengaruh sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat mempengaruhi apakah

laporan tersebut menyajikan informasi yang berkualitas atau tidak. Pelatihan penyusunan laporan keuangan sangat penting bagi pelaku penyusun laporan keuangan karena berguna untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsi-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia (Febriyanto : 2022) Dan sebagai sebuah elemen organisasi yang sangat penting, agar dapat memberikan kontribusi yang optimal tentunya harus didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Karena kompetensi merupakan salah satu karakter yang mendasari seseorang mampu mencapai kinerja yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian Zetra (2009) terhadap 10 SKPD di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan 2009, diketahui bahwa sebagai akibat kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan khususnya keahlian dalam akuntansi menyebabkan SKPD masih kesulitan dalam menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan secara transparan, akuntabel dan tepat waktu sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Di dalam pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, volume transaksi keuangan yang dilakukan sangat besar dan kompleks. Sehingga diperlukan sebuah

system informasi yang dapat mendukung proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan efisiensi waktu pelaksanaan. Sebagaimana pendapat Wahana Komputer (2003) bahwa suatu teknologi informasi dapat memberikan manfaat antara lain dalam hal kecepatan proses transaksi dan penyiapan bahan laporan, keakuratan dalam perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, serta kemampuan proses transaksi yang banyak dalam waktu yang bersamaan (multiprocessing).

Sistem informasi dapat berfungsi secara optimal bila sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan memiliki kompetensi yang baik dan terampil dalam penggunaan sistem informasi tersebut. Dalam hal ini termasuk kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan fitur-fitur pengolahan data pada aplikasi sistem informasi yang digunakan tersebut.

Selain dipengaruhi oleh aparatur yang berkompeten dan didukung system informasi yang tepat, kualitas laporan keuangan pada sebuah organisasi perangkat daerah dalam proses pelaksanaannya juga harus didukung dengan system pengendalian intern yang handal pada unit kerja tersebut. Dimana system pengendalian intern tersebut berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga mampu menghasilkan informasi yang reability, objektif, dan dapat mencegah

terjadinya inkonsistensi dalam pengungkapan data dan informasi.

Berdasarkan pengertian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa arti kata pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, melalui pengawasan yang dilakukan secara internal oleh atasan/pimpinan terhadap kinerja bawahannya dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun.

Pemerintah Kota Metro dalam 10 tahun terakhir secara berturut-turut memperoleh opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam arti bahwa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Sistem Pengendalian Intern atas LKPD Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2017 – 2019, masih ditemukan permasalahan yang sama dalam penyajian LKPD dan menjadi koreksi serta catatan pemeriksaan hasil audit, antara lain yaitu : 1)Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Barang Extracomptabel belum tertib, 2)Pengelolaan Persediaan belum tertib, dan 3) Pengelolaan Piutang belum optimal.

Serta berdasarkan daftar penyampaian laporan keuangan SKPD pada

BPKAD Kota Metro, masih terdapat fakta bahwa sebagian besar SKPD terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Serta pada laporan keuangan SKPD tersebut masih banyak data yang salah dan tidak tepat, serta tidak dilengkapi informasi dan penjelasan yang cukup. Sehingga hal ini berakibat proses rekonsiliasi dan konsolidasi pada proses penyusunan LKPD yang dilakukan oleh BPKAD Kota Metro menjadi terhambat dan tidak optimal.

Berdasarkan latar belakang serta hasil beberapa peneliti serta informasi yang diperoleh dari BPKAD Kota Metro tersebut di atas, bahwa belum semua SKPD dapat menyusun komponen laporan keuangan secara lengkap dan handal, serta belum disampaikan dengan tepat waktu. Sedangkan kita ketahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD serta Laporan Pertanggungjawaban Pengelola Perbendaharaan Daerah (PPKD selaku BUD). Sehingga laporan keuangan SKPD sebagai sumber data yang utama sangat berperan dan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dihasilkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun dan

disajikan oleh SKPD khususnya terbatas pada faktor Sumber Daya Manusia, penggunaan Sistem Informasi, serta penerapan system pengendalian intern di dalam unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Dalam hal ini judul penelitian yang dilakukan yaitu Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

#### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Temuan berulang permasalahan penatausahaan dan pelaporan data Barang Milik Daerah, Persediaan, dan Piutang pada Laporan Keuangan SKPD yang belum tertib berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro tahun 2017-2019.
2. Sebanyak 21 SKPD dari total 32 SKPD (65,6%) terlambat menyampaikan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran 2019.
3. Sebagian besar masih terdapat kesalahan penyajian data pada komponen Laporan Keuangan SKPD khususnya pada laporan akrual yaitu Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Keuangan SKPD tidak dilengkapi data pendukung serta informasi dan penjelasan yang cukup.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
2. Untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

### **Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Akademisi  
Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan informasi dibidang manajemen sumber daya manusia, serta diharapkan juga dapat membangkitkan minat serta memotivasi peneliti lainnya untuk melakukan riset dengan variabel yang lebih banyak lagi.
2. Kegunaan Teoritis  
Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan bantuan literatur yang bermanfaat pada mahasiswa maupun karyawan yang membaca proposal tesis ini khususnya pada bidang laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah menganalisis Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan didalam penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

## **Kajian Teoritik**

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan definisi Spencer dan Spencer dalam Rudi Setiaji (2021) yang mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar seorang pekerja yang menggunakan bagian kepribadiannya yang paling dalam, dan dapat mempengaruhi perilakunya ketika ia menghadapi pekerjaan yang akhirnya mempengaruhi kinerjanya.

Haerani et al., (2020), Sumber daya manusia dalam perusahaan merupakan aset terpenting untuk menjalankan siklus operasional perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pencapaian tujuan organisasi.

Mathis dan Jackson dalam Rudi Setiaji (2021) mendefinisikan bahwa kompetensi dilihat dari 2 hal yaitu pengetahuan lebih terlihat dan dapat dikenali, serta Keterampilan yang sebagian mungkin dapat terlihat sebagian lagi kurang dapat teridentifikasi. Kompetensi berupa kecakapan yang tidak terlihat mungkin lebih dapat meningkatkan kinerja yang harus dimiliki oleh tenaga kerja (SDM) dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan/disepakati. Hal ini senada dengan yang disimpulkan Armstrong

(2004), bahwa kompetensi adalah knowledge, skill dan kualitas individu untuk mencapai kesuksesan pekerjaannya.

Sedangkan menurut Trotter dalam Saifuddin (2004) bahwa seorang yang berkompoten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan kepribadian karakteristik yang secara langsung mempengaruhi kinerja mereka (Hendri dkk., 2020). Kompetensi sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai-nilainya, keterampilan, pengalaman, karakteristik, motivasi, masalah emosional, kemampuan intelektual dan budaya organisasi. Selain kompetensi sumber sebagai faktor internal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan adalah sikap finansial (Khanifah et al., 2017).

Merujuk pada Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. *Self concept* adalah sikap, nilai, atau citra yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri;

yang memberikan keyakinan pada seseorang siapa dirinya. *Knowledge* adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tertentu. *Skill* adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, baik mental atau pun fisik.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan. Hutapea (2008) menyatakan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku individu yang dimiliki oleh setiap individu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disintesis bahwa kompetensi SDM adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan perilaku seseorang dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan baik, efektif, efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

### **Teknologi Informasi**

Menurut Jurnal & Supomo (2002), pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah dalam Efendi, et.al., 2017) .

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., dalam Efendi, et.al., 2017). Teknologi informasi selain sebagai teknologi computer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Stianingsih dan Wijanto dalam Efendi, et.al (2017) memperoleh bukti bahwa penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi dapat mempengaruhi kepuasan pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dalam kaitannya pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat disintesis bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi mengacu pada efektifitas penggunaan teknologi informasi dalam pengolahan data dan transaksi secara elektronik untuk mencapai kualitas, kecepatan dan keakuratan data dalam pelaporan keuangan daerah.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud).

Menurut Mulyadi (2016) Sistem pengendalian intern meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. salah satu cara untuk melihat ke efektifitasan suatu pengendalian internal adalah dengan sebuah kesalahan atau mismanagement karena hal tersebut berkaitan langsung dengan standar operasional pada sebuah perusahaan.

Menurut Wilkinson et al., dalam Noviana (2015), indikator dari sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut : 1. Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Pemisahan wewenang; 3. Dokumen dan catatan yang memadai; 4. Tindakan disiplin atas pelanggaran 5. Pembatasan akses; 6. Langkah-langkah pencegahan kerusakan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern

(SPI) adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur-unsur didalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah meliputi sebagai berikut: Lingkungan Pengendalian; Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; Pemantauan Pengendalian Intern.

Sistem pengendalian intern menurut Institut Akuntan Publik Indonesia di dalam Standar Audit (SA) 319 (2013) adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Arens et al. dalam Kuasa et al., (2016) menyebutkan bahwa Penerapan pengawasan intern yang meliputi menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi di dalam entitas akuntansi sehingga dengan berjalannya seluruh tahapan pengendalian intern tersebut maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas.

Pengawasan dan pengendalian intern diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Tentunya hal ini memerlukan kemampuan manjerial di dalam suatu tatanan organisasi.

Menurut Prezyna,et.al dalam Suharto (2018) mengatakan bahwa manajer yang memiliki kemampuan untuk memimpin tentunya dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan tugasnya sehingga peran manajer perusahaan memiliki pengaruh penting bagi kinerja karyawan tapak perusahaan. Menurut pendapat Winardi (2013) menyatakan bahwa kemampuan manajerial adalah kesanggupan mengambil tindakan–tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Siagian, P. Sondang (2017) menyebutkan bahwa

keterampilan manajerial adalah keahlian menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan baik.

Di dalam organisasi kemampuan manajerial sangat berkaitan erat dengan manajemen kepemimpinan yang efektif, karena sebenarnya manajemen pada hakekatnya adalah masalah interaksi antara manusia baik secara vertikal maupun horizontal. Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi dan semua metode maupun alat-alat yang dikoordinasikan dan digunakan dalam organisasi tersebut dengan tujuan untuk membantu mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan. Karena apabila suatu kebijakan tidak dikontrol dan dilaksanakan dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak terjamin sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan.

Di dalam struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksana tugas dan fungsi yang terkait langsung dalam sistem pengendalian internal penyusunan laporan keuangan SKPD dilaksanakan oleh kepala sub bagian keuangan. Yang merupakan unit kerja dibawah Sekretariat SKPD yang dipimpin sekretaris dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sebagai atasan langsung. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian keuangan antara lain melaksanakan fungsi penyusunan dokumen perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan termasuk fungsi verifikasi atas pelaksanaan administrasi pendapatan dan belanja daerah oleh bendahara pengeluaran, serta fungsi

akuntansi dan pelaporan keuangan SKPD (Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disintesis bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses di dalam manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

#### **Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah, dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat, badan, dinas dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja, sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah (Indiasari & Nahartyo, 2008). Salamun dalam Efendi, et al., (2017) menyatakan bahwa asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, asumsi dasar tersebut meliputi asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas dan asumsi keterukuran dalam satuan uang. Pelaporan keuangan sektor publik juga disusun atas dasar prinsip-prinsip pelaporan. Prinsip pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan daerah, maka Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kriteria dan

unsur-unsur kualitas atau nilai informasi dari laporan keuangan pemerintah telah ditentukan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ada empat macam karakteristik kualitas informasi keuangan yaitu :

1. Relevan; informasi tersebut harus tersedia tepat waktu bagi setiap pengguna informasi guna pengambilan keputusan (*timeliness*) sesuai dengan periode yang dilaporkan.
2. *Reliable*/Andal; informasi disajikan secara wajar keadaan atau peristiwa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan teruji kebenarannya.
3. Penyajian secara wajar (*representation faithfulness*); Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut.
4. Dapat dibandingkan; Informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
5. Dapat dipahami; Informasi mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pihak pengguna sesuai maksud informasi tersebut dan tidak bias.

Dari uraian di atas dapat disintesis bahwa Kualitas laporan keuangan SKPD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

mengacu pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, tepat waktu dan dengan informasi yang andal, relevan dan mudah dipahami.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif asosiatif. Menurut Sugiyono (2014), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Sedangkan penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih.

Sugiyono (2014) juga menjelaskan metode penelitian kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif menjadi penentu dalam sebuah penelitian karena keduanya dapat memberikan jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

## **Populasi dan Sampel**

### **Populasi**

Populasi merupakan subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan

sesuai masalah penelitian yang akan dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono: 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

### **Sampel**

Sampel menurut pendapat Suharsimi Arikunto (2010: 174) adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai dari 27 SKPD yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendukung penelitian ini yaitu terdiri dari Kepala sub bagian keuangan dan atau staf yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan pada SKPD Kota Metro, disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing SKPD.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Pemerintah Kota Metro**

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro. Kota Metro merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah bersama-sama dengan Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili ibukota di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro adalah pemerintah

kota kedua diantara 14 Pemerintah Daerah Tingkat II di bawah Pemerintahan Provinsi Lampung. Pelaksanaan kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan di Kota Metro dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Kewilayahan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Delapan belas dinas daerah, yaitu Dinas Pendidikan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Usaha

- Menengah, dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dan Dinas Perdagangan;
5. Enam badan daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
  6. Daerah, dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  7. Lima kecamatan yaitu Kecamatan Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Selatan, dan Metro Utara;
  8. Dua Puluh Dua Kelurahan.

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.675	7.949		1.720	.092
Kompetensi SDM	.411	.114	.452	3.616	.001
Teknologi Informasi	.317	.134	.292	2.376	.021
Sistem Pengendalian Intern	.226	.082	.245	2.763	.008

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan nilai  $\beta$  pada tabel coefficients di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + et$$

$$Y = 13,675 + 0,411X_1 + 0,317X_2 + 0,226X_3 + et$$

Sedangkan hipotesis berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Kompetensi SDM (X1) memiliki nilai t

hitung  $3,616 > t$  tabel  $2,00856$  dan nilai Sig.  $0,001 < 0,05$ , variabel Teknologi Informasi (X2) memiliki nilai t hitung  $2,376 > t$  tabel  $2,00856$  dan nilai Sig.  $0,021 < 0,05$ , variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) memiliki nilai t hitung  $2,763 > t$  tabel  $2,00856$  dan nilai Sig.  $0,008 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas tersebut memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan (Y) dan hipotesis diterima.

2. Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1866.196	3	622.065	30.004	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1036.638	50	20.733		
	Total	2902.833	53			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kompetensi SDM

Berdasarkan output SPSS pada tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 30.004 lebih besar dari nilai F tabel 2,79. Dan nilai Sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga pada Uji F penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Diterima, atau dengan kata lain bahwa variabel Kompetensi

SDM (X1), Teknologi Informasi(X2) dan Sistem Pengendalian Intern (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y). Dan dapat dilanjutkan untuk pada pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.802 <sup>a</sup>	.643	.621	4.553

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kompetensi SDM

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi output SPSS di atas diperoleh nilai R Square ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0,643, Hal

ini berarti bahwa besarnya pengaruh variabel Kompetensi SDM (X1), Teknologi Informasi(X2) dan Sistem Pengendalian

Intern (X3) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 64,3 %, sedangkan sisanya 35,7% dipengaruhi variabel lain yang bukan objek penelitian ini.

#### Pembahasan

##### 1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

SKPD sebagai entitas akuntansi pada pemerintah daerah berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keuangan daerah yang dikelolanya. Sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan harus dapat memberikan informasi yang cukup dan jelas sebagai bentuk akuntabilitas atas setiap penggunaan anggaran daerah tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusianya. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan SKPD agar informasi yang disajikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam memenuhi tuntutan untuk mencapai akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintahan baik. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pencapaian kualitas laporan keuangan SKPD yang dihasilkan khususnya dalam penyajian data-data setiap komponen laporan

keuangan berikut informasi yang menjelaskan secara rinci atas laporan keuangan tersebut.

Pengaruh sumber daya manusia berperan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Sehingga informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan SKPD dapat diperoleh dengan lebih baik. Maka jika sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut tidak memiliki kompetensi yang baik atau memiliki pemahaman yang rendah tentunya akan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugasnya. Tentunya kompetensi sdm ini baik dalam hal pengetahuan dan ketrampilan dalam pengolahan data, penggunaan teknologi informasi maupun dalam pengelolaan keuangan, serta akuntansi dan pelaporan yang sangat berperan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD.

Dan berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kompetensi pegawai yang melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan pada SKPD di lingkungan pemerintah kota Metro sudah cukup baik walaupun belum merata khususnya dalam hal pengetahuan dan kemampuan proses akuntansi dan pemahaman terhadap nilai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan data pendidikan responden diketahui bahwa

pegawai di SKPD Pemerintah Kota Metro yang melaksanakan tugas di sub bagian keuangan dan terlibat langsung dengan penyusunan laporan keuangan SKPD sebanyak 83 % memiliki jenjang pendidikan Diploma 3 , Strata 1 dan Strata 2, dengan basis pendidikan yang beragam. Adapun pegawai yang memiliki basis pendidikan akuntansi hanya sebesar 14,8 %, jurusan ekonomi lainnya sebanyak 29,6 % dan jurusan lainnya sebanyak 55,6 %. Akan tetapi berdasarkan jawaban atas pertanyaan pada item 11 s/d 14 variabel kompetensi SDM diketahui bahwa lebih dari 60% pegawai yang menjadi responden sudah mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah termasuk tentang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Dan dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis tersebut cukup membantu atas pelaksanaan pekerjaannya. Dan berdasarkan wawancara dengan Bidang Akuntansi BPKAD Kota Metro bahwa cukup sering dilaksanakan pembinaan secara berkala terkait penegelolaan dan pelaporan keuangan pada pengelola keuangan di SKPD. Hal ini menjadikan SDM pengelola keuangan SKPD cukup kompeten dalam pelaksanaan tugasnya dan mampu memilah informasi yang akan disajikan pada laporan keuangan SKPD. Akan tetapi ditemukan bahwa

keterbatasan jumlah pegawai yang ada di sub bagian keuangan SKPD yang menjadi kendala. Karena dengan jumlah pegawai yang terbatas akan tetapi beban kerja yang besar menjadi hambatan dalam pekerjaannya. Karena selain melaksanakan tugas di bidang keuangan sekaligus juga melaksanakan tugas sub bagian perencanaan. Apalagi dengan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis serta penggunaan beberapa macam aplikasi yang harus dilaksanakan menyebabkan pegawai cukup keteteran dan tidak fokus dalam penyusunan laporan keuangan SKPD dan berpotensi salah dalam penginputan data keuangan dan berakibat pada salah penyajian serta terlambatnya penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan SKPD.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM sangat berpengaruh terhadap penyajian kualitas laporan keuangan SKPD. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Celviana Winidyaningrum tahun 2009 dengan judul Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern

Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten).

## 2. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik penelitian ini diketahui bahwa variabel teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu kinerja pegawai dalam proses penyusunan laporan keuangan SKPD. Khususnya dalam hal percepatan proses dan keakuratan dalam pengolahan data transaksi pelaporan keuangan. Dengan penggunaan teknologi informasi yang tepat maka tingkat kinerja dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahana Komputer (200) bahwa manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi informasi antara lain kemampuan memproses dan mengolah data transaksi dengan cepat serta penyimpanan data dalam jumlah besar serta keakuratan penyiapan pelaporan dengan kemampuan multiprocessing sehingga dapat menghemat biaya operasional.

Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner diketahui bahwa sebagian besar SKPD telah memiliki sarana komputer dan jaringan internet yang baik sehingga proses operasional sistem informasi pengelolaan keuangan cukup lancar. Serta sistem informasi yang digunakan sudah sesuai dengan standar akuntansi dan laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai dengan

kebutuhan. Akan tetapi yang menjadi kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi keuangan ini adalah kemampuan pegawai menggunakan fitur-fitur pada sistem tersebut secara maksimal agar dapat mengurangi kesalahan pada saat entry data yang berakibat pada kesalahan laporan keuangan yang dihasilkan. Karena kesalahan pada saat entry data tersebut berdampak pada proses perhitungan setiap jenis laporan yang dihasilkan, sehingga membutuhkan proses koreksi yang cukup panjang. Hal ini berdampak pada keakuratan data pada laporan keuangan tidak tercapai. Disamping itu diketahui pula bahwa sistem informasi berupa aplikasi perencanaan anggaran, aplikasi sistem pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah belum terintegrasi dengan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga menyebabkan hambatan pada saat entry data menjadi lebih lambat, karena harus diinput ulang pada proses akuntansinya dan perlu migrasi data setiap awal tahun pelaporan keuangan.

Untuk mencapai keandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan sesuai yang diharapkan, maka di dalam pemanfaatan teknologi informasi agar lebih optimal, sangat dipengaruhi oleh perangkat keras dan lunak yang digunakan, pembaruan data (updating), sistem informasi yang mudah dipahami, serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan menggunakan sistem informasi tersebut.

### 3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil perhitungan statistic penelitian ini diketahui bahwa variabel system pengendalian intern (X3) berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y). Dimana sistem pengendalian intern merupakan upaya yang diterapkan di dalam organisasi untuk mengendalikan dan meminimalisir kesalahan atas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggungjawab organisasi dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tercapainya laporan keuangan yang akurat, handal, dan selesai tepat pada waktunya.

Dengan penerapan system pengendalian intern yang tepat menjadikan lingkungan kerja organisasi dapat lebih efektif, mulai dari pembagian tugas dan tanggungjawab untuk setiap pegawai yang ada, alur pelaporan, pengendalian dan pengawasan dapat berjalan lebih baik pada setiap tahapan, sehingga dapat bermanfaat terutama dalam hal penyelesaian kinerja dan setiap kendala-kendala yang ada sesuai dengan alur dan waktu yang tepat sebagaimana yang diharapkan.

System pengendalian intern di dalam sebuah organisasi sebagai pola yang disusun dalam rangka mendapatkan keyakinan yang memadai atas

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta kemampuan melaksanakan program dan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan kualitas dan keandalan laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel system pengendalian intern sebagian besar sudah dilakukan dengan baik. Hal ini diketahui bahwa rata-rata lebih 80 % menjawab setuju dan sangat setuju atas semua item pertanyaan terkait standar operasional prosedur serta tugas dan tanggung jawab. Akan tetapi pada item pertanyaan pengawasan dan evaluasi yang terkait peran atasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan diketahui bahwa sebagian besar atasan telah memberikan arahan, pembagian tugas dan melakukan pembinaan terhadap staf keuangan. Akan tetapi masih lemah dalam hal pelaporan berkala atas pekerjaan yang disampaikan staf. Disamping itu atas laporan pekerjaan yang disampaikan oleh staf kepada atasan apakah diteliti dan dicek kembali oleh atasan, 13% menjawab tidak setuju dan 7,4% menjawab ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa di SKPD Pemerintah Kota Metro sudah ada

pembagian tugas, pengarahan, pembinaan yang baik oleh atasan terhadap bawahannya. Akan tetapi masih perlu peningkatan dalam hal pelaporan berkala dan pengecekan kembali pekerjaan bawahan oleh atasan, karena hal ini dapat berpotensi pada laporan yang dihasilkan berkali-kali harus dilakukan perbaikan sehingga berpengaruh pada keakuratan dan percepatan dan ketepatan waktu proses penyusunan laporan keuangan. Karena kualitas laporan keuangan tidak hanya dilihat dari kualitas informasi yang disajikan tetapi juga pada ketepatan waktu penyampaiannya.

#### 4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik Uji F pada penelitian ini diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 30.004 lebih besar dari nilai F tabel 2,79. Dan nilai Sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Diterima, atau dengan kata lain bahwa variabel Kompetensi SDM (X1), Teknologi Informasi (X2) dan Sistem Pengendalian Intern (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Kualitas Laporan keuangan khususnya pada laporan keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas laporan keuangan SKPD. Karena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gabungan atau konsolidasian atas seluruh laporan keuangan SKPD.

Sehingga apabila terdapat kesalahan penyajian pada salah satu laporan keuangan SKPD dapat berakibat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi salah saji juga.

Kesalahan penyajian dapat terjadi pada penyajian data laporan keuangan inti seperti laporan realisasi anggaran, laporan operasional, Neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan Perubahan saldo anggaran lebih, termasuk juga kesalahan saji pada informasi dan penjelasan terinci pada catatan atas laporan keuangan. Hal ini dapat berakibat nilai informasi pada laporan keuangan menjadi tidak akurat dan tidak tepat.

Tentunya kualitas laporan keuangan selain diukur dari keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan, juga pada ketepatan waktu dalam penyampaiannya menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan SKPD harus dapat menjelaskan secara material atas setiap komponen laporan keuangan. Serta dilaporkan dan disampaikan tepat waktu. Karena laporan keuangan SKPD ini akan menjadi bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Apabila laporan SKPD tidak memiliki kualitas yang baik serta terlambat disampaikan, tentunya berdampak pada keterlambatan proses rekonsiliasi dan konsolidasi proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Oleh sebab itu guna menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas

informasi yang baik, handal, akuntabel serta penyampaian yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka menjadi penting untuk memperhatikan setiap faktor yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Khususnya pada SKPD selaku pelaksana utama pengelolaan keuangan daerah, antara lain yaitu dengan memperhatikan faktor sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan SKPD yang memiliki kompetensi yang baik, penyediaan teknologi informasi dengan didukung sarana dan prasarana yang baik dan *up to date*, serta terciptanya lingkungan kerja dengan system pengendalian intern organisasi yang tepat dan efektif. Tentunya kinerja yang baik untuk setiap faktor tersebut dapat dicapai bila system manajemen di organisasi dilaksanakan dengan baik untuk setiap fungsinya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Hasil olah data penelitian yang bisa disimpulkan yakni:

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh positif kepada variabel kualitas suatu laporan keuangan yang dihasilkan. Pengaruh sumber daya manusia berperan dalam

setiap tahapan penyajian keuangan pemerintah daerah yaitu dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, sampai pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Sehingga data yang diolah di dalam suatu laporan keuangan SKPD bisa diperoleh dengan lebih baik.

Sebanyak 60% pegawai/SDM pengelola keuangan SKPD di Pemerintah Kota Metro yang menjadi responden sudah pernah mendapatkan pelatihan dan pembelajaran teknis terkait pengelolaan dari keuangan yang ada di daerah termasuk terkait akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Serta telah dilakukan pembinaan secara reguler oleh BPKAD Kota Metro selaku SKPD pembina keuangan daerah. Hal ini menjadikan SDM pengelola keuangan SKPD cukup kompeten dalam pelaksanaan tugasnya dan mampu memilah informasi yang akan disajikan pada laporan keuangan SKPD dengan baik. Akan tetapi ditemukan bahwa masalah keterbatasan jumlah pegawai yang terdapat di Subbag keuangan SKPD yang menjadi kendala dalam hal penyelesaian laporan keuangan secara tepat waktu. Mengingat jumlah pegawai yang terbatas akan tetapi

beban kerja yang besar menyebabkan kinerja dalam pekerjaannya tidak optimal.

2. Variabel teknologi informasi berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Pemakaian teknologi informasi dapat membantu kinerja pegawai dalam proses penyusunan laporan keuangan SKPD. Terkhusus pada hal percepatan proses dan keakuratan dalam pengolahan data transaksi pelaporan keuangan.

Sebagian besar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro telah memiliki sarana dan prasarana teknologi informasi dan jaringan internet yang baik. Akan tetapi tetapi yang menjadi kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi keuangan ini adalah kemampuan pegawai menggunakan fitur-fitur pada system aplikasi belum optimal dan masih sering terjadi kesalahan input data. Selain itu system informasi yang menunjang pelaporan keuangan masih terpisah dan belum terintegrasi antara aplikasi perencanaan anggaran, aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi manajemen barang milik daerah/aset sehingga perlu diinput ulang dan proses migrasi.

3. Variabel system pengendalian intern berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Dimana sistem kendali internal merupakan upaya yang dipakai di dalam organisasi untuk mengendalikan dan meminimalisir kesalahan atas pengelolaan keuangan daerah yang

menjadi tanggungjawab organisasi dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tercapainya laporan keuangan yang akurat, handal, dan selesai tepat pada waktunya.

Pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro sudah ada pembagian tugas, pengarahan, pembinaan yang baik oleh atasan terhadap bawahannya. Akan tetapi masih perlu peningkatan dalam hal pelaporan berkala dan pengecekan kembali pekerjaan bawahan oleh atasan, karena hal ini dapat berpotensi pada laporan yang dihasilkan harus dilakukan perbaikan berulang sehingga berpengaruh pada keakuratan dan percepatan dan ketepatanwaktuan penyusunan laporan keuangan.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan selain diukur dari keandalan informasi yang disajikan juga pada ketepatanwaktuan dalam pelaporan dan penyampaiannya. Untuk mencapai hal tersebut wajib didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan pemahaman terhadap tugas dan fungsinya dengan baik, pemanfaatan teknologi secara optimal, serta sistem pengendalian intern yang baik bagi setiap orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan

keuangan di dalam struktur organisasi tersebut.

#### B. Saran

Menindaklanjuti hasil penelitian yang diperoleh dan dalam rangka peningkatan kinerja guna mendukung tercapainya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro agar lebih baik dan optimal, maka diusulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang ada di SKPD, minimal terdapat 1 orang pegawai yang memiliki basis pendidikan akuntansi. Serta perlu dilaksanakan kembali kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis secara berkala tentang pengelolaan keuangan daerah, khususnya tentang akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pegawai SKPD, mengingat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah yang sangat dinamis serta perputaran/rotasi pegawai yang sering terjadi di lingkungan SKPD.
2. Disarankan untuk mempercepat proses integrasi antara system informasi perencanaan anggaran, sistem Informasi pengelolaan

Keuangan daerah, dan sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dan dilakukan pembinaan serta bimbingan teknis tentang penggunaan aplikasi/system informasi tersebut agar dapat di pahami pegawai dengan lebih baik.

3. Agar system pengendalian intern di SKPD dapat lebih baik disarankan untuk membuat dan menyusun standar operasional prosedur terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan di SKPD. Dan dilakukan pembinaan berkala oleh SKPD pengampu pengawasan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
4. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk mempelajari masalah yang sama, disarankan untuk meneliti dengan menambahkan variabel - variabel lain seperti peran dan kapasitas pimpinan dalam mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Atau menganalisa tentang sejauhmana laporan keuangan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aidinil Zetra. (2009). Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Penelitian. Padang: Balitbang Provinsi Sumatera Barat.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta.
- Baswir, R. (1999). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE., 3.
- Desianawati, K., N.T, Herawati, dan N. K, Sinarwati. 2014. —Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha 2 No 1
- Efendi, L., Darwanis, & Abdullah, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vo. 3, No. 2, ISSN: 2502-6976.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. E-Jurnal EKonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.3 ISSN: 2337-3067, 403-428.
- Firdaus, Nadirsyah, & Fahlevi H. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peneraan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Magister Akuntansi ISSN: 2302-0164.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haerani, S., Sumardi, Hakim, W., Hartini, & Putra, A. H. P. K. (2020). Structural model of developin human resources performance: Empirical study of Indonesia States Owned Enterprises. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(3), 211-221. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no3.211>.
- Halim Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Revisi seri bunga rampai Manajemen keuangan Daerah: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Hendri, H., Yuliantoro, & Ama, M. K. (2020). Determinats of Fraud Prevention And Financial Performance as an Intervening Variable. International Journal of Economics and Financial Issues, 10(1), 19–26.
- Hutapea, T. 2008. Kompetensi Plus. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indiasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh Kapabilitas Sumber
- Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 4 (2023) No. 2  
ISSN Cetak 2746-5551  
ISSN Online 2746-556X

- Daya Manusia, dan Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simponi Nasional Akuntansi VII.
- Jayanti, O. S., & Febriyanto, F. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kelurahan Sumbersari). *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*, 2(3), 593-602.
- Jurnalis, T., & Supomo, B. (2002). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi Dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi* 5.2, 214-228.
- Khanifah, Anam, M. C., & Astuti, E. B. (2017). Pengaruh Attitude Toward Behavior, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control Pada Intention Whistleblowing. *Jurnal Akses*, 1224, 147-158.
- Keputusan Presiden No.74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Kuasa, Nadirsyah dan Abdullah, Syukri. 2016. "Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue." *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol. 5, No. 2, Hlm. 47 – 56. Program Magister Akuntansi. Universitas Syiah Kuala.
- Lillrank, Paul. 2003. "The quality of information", *International Journal of Quality & Reliability Management* Vol. 20 No. 6 pp. 691-703
- Mahaputra, I. P., & Putra, I. W. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2 ISSN: 2302-8556, 230-244
- Manullang, (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhamad Alwi. 2017, "Pengaruh Kompensasi, Kompetensi, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Cv. Xyz". *Jurnal Logika*, Vol XIX No 1 April 2017. p-ISSN : 1978-2560.
- Nordiawan, D. (2008). *akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro..

- Priyatno, Dwi. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CAPS.
- Saifudin. (2004). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasi eksperimen Pada Auditor Dan Mahasiswa). Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro
- Santoso, S. (2015). SPSS 20 Pengolahan Data Statistik di Era Informasi. Jakarta, PT. Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Sekaran, Uma. (2007). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, P. Sondang. (1999). Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: PT. Rineka.
- Standar Audit Seksi 319. (2013:2). Standar Profesional Akuntan Publik. IAPI. DSP.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung. Alfabeta.
- Suharto, Jawoto Nusantoro (2018), "The Relationship Among Managerial Capability, Organizational Citizenship Behavior, And Employee Performance: Mediation Effects Of Organizational Culture". Volume 2 Number 1 p-ISSN: 2549-1849 | e-ISSN: 2549-3434. Journal of Community Research and Service
- Sukmaningrum, T.(2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Umar, Husein. (2008). Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahana Komputer. (2003). Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Winardi, J. (2013). Manajemen Prilaku Organisasi. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Winidyaningrum dan Rahmawati. 2009. Pengaruh Sumber Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto Vol 18 No 1
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Bisnis dan EKonomi Vol. 14, No.